

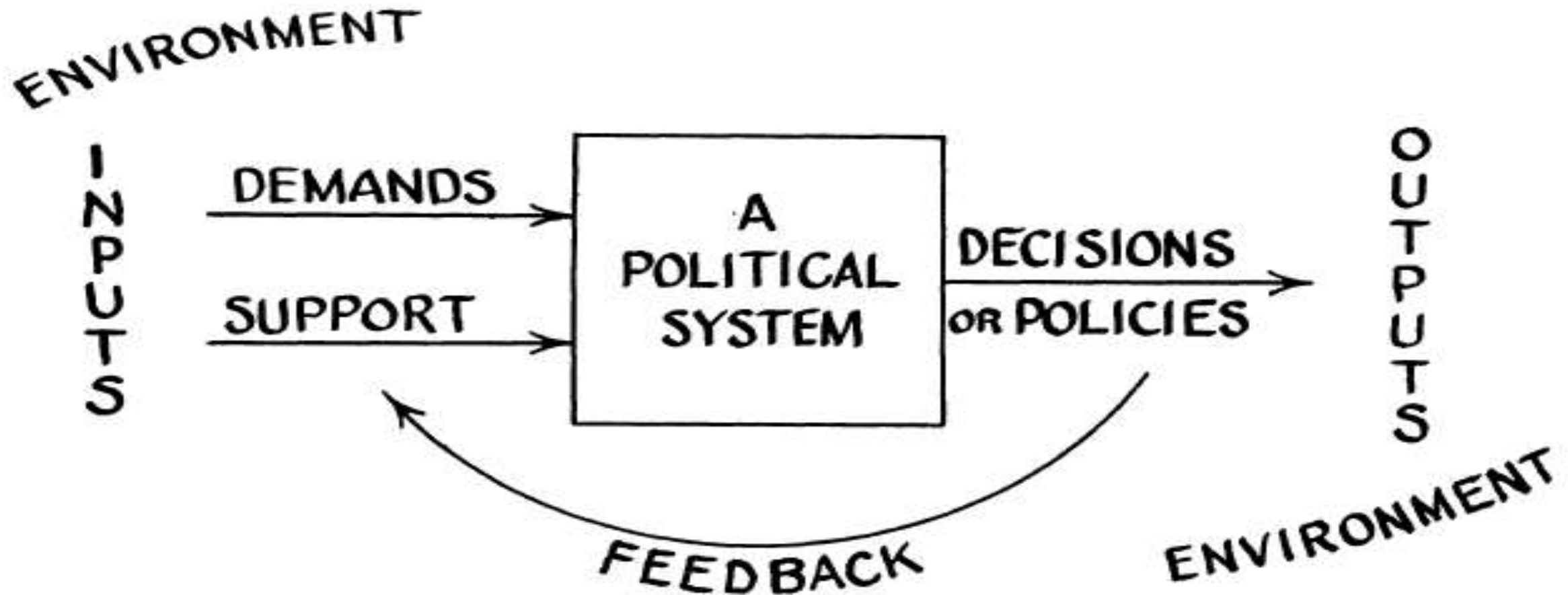
Potret Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)

Samsuri

Email: samsuri@uny.ac.id

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (1)

SISTEM POLITIK



ENVIRONMENT

ENVIRONMENT

(Demands)
INPUTS
(Supports)

Conversion

Interest Articulation
Interest Aggregation
Communication

MAINTENANCE

THE
POLITICAL
SYSTEM

Rule Making
Rule Application
Rule Adjudication

ADAPTATION

Conversion

(Decisions)
OUTPUTS
(Actions)

Regulative Capability
Extractive Capability
Symbolic Capability
Distributive Capability
Responsive Capability

ENVIRONMENT

ENVIRONMENT

Level REFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL

Tingkat Atas:

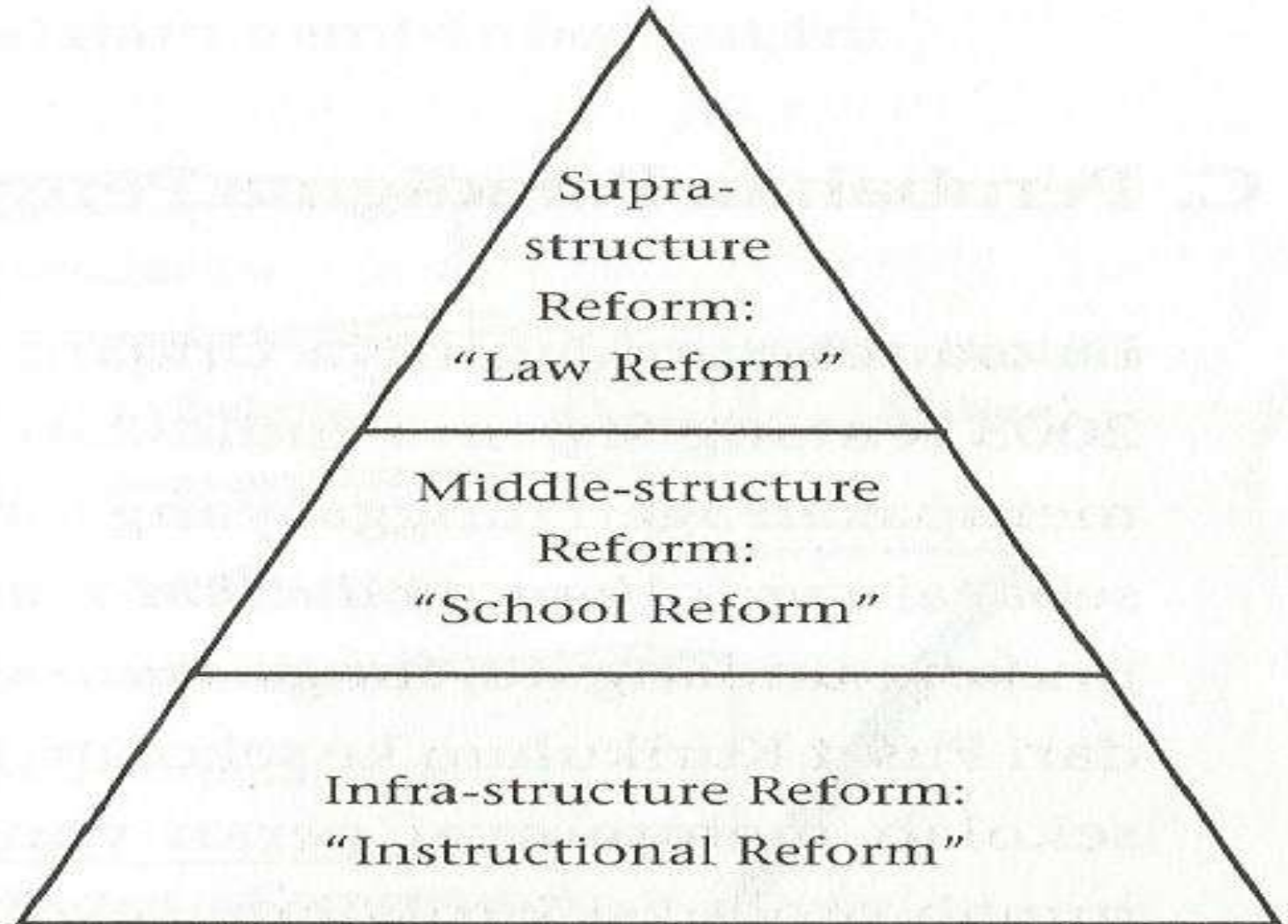
Reformasi Peraturan
Perundang-undangan
tentang Pendidikan

Tingkat Tengah:

Reformasi Sekolah
dengan dukungan MBS

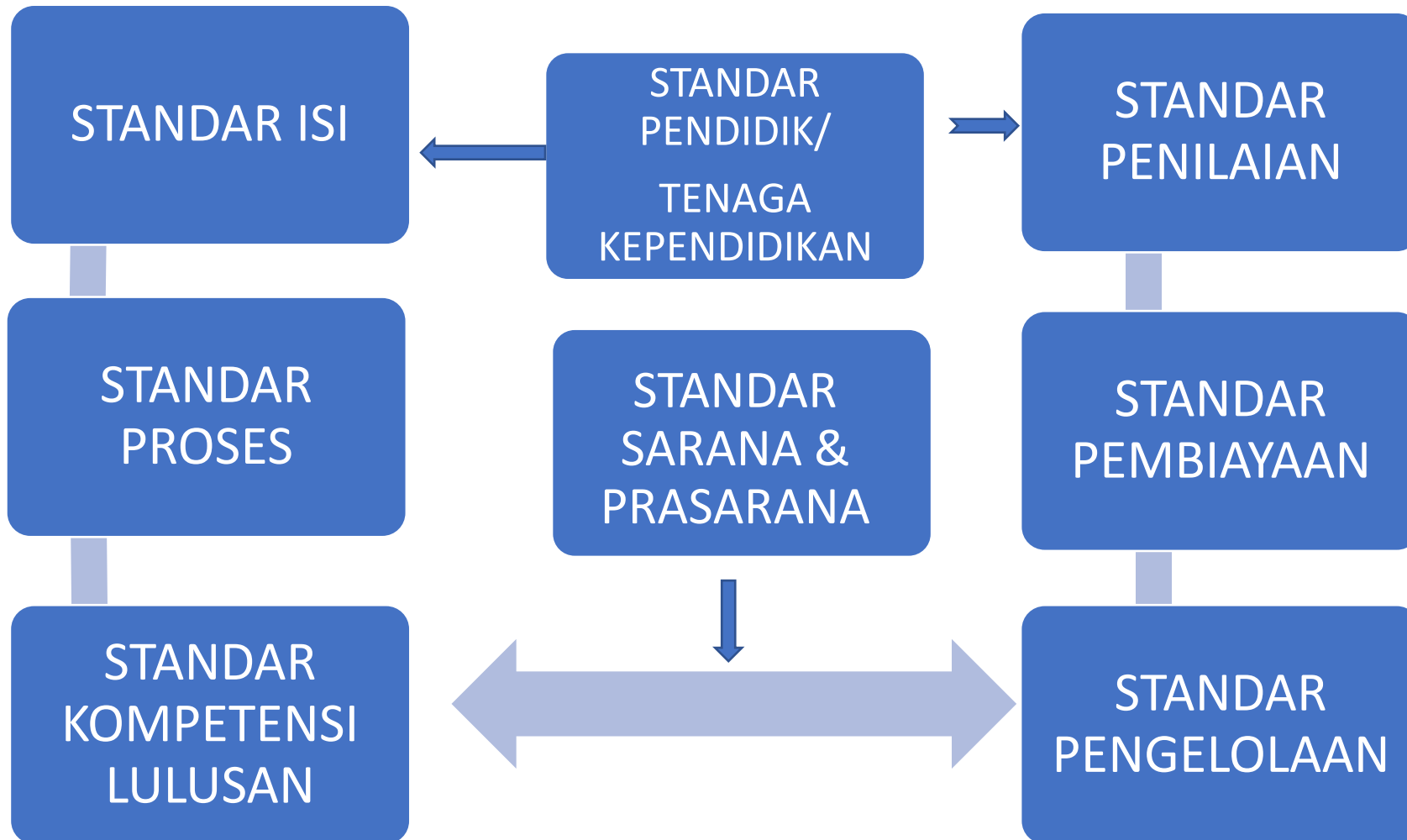
Tingkat Bawah:

Reformasi Pembelajaran
dengan dukungan sumber
belajar yang bervariasi



SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (2)

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



NOMENKLATUR PKN DALAM SISDIKNAS

- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN MORAL
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN DEMOKRASI
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KEBANGSAAN
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK
- PKN SEBAGAI

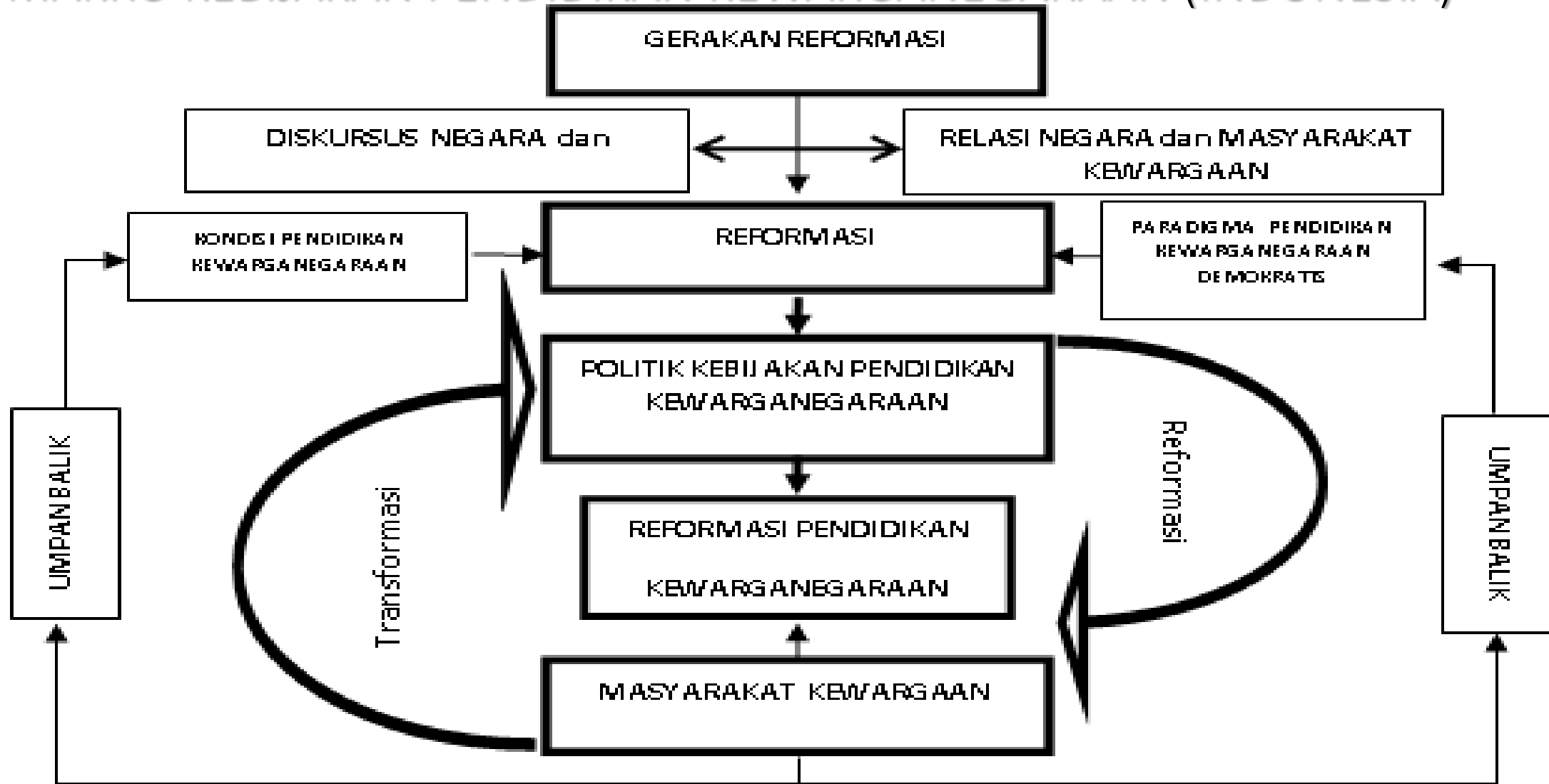
RAGAM KAJIAN PKN DALAM SEJUMLAH NOMENKLATUR

<i>Country</i>	<i>Terminology</i>	<i>Approach</i>	<i>Hours per week</i>
New Zealand	Social studies	Statutory core Integrated	Not specified
Singapore	Civics and moral education	Statutory core Integrated and specific	2 × 30 minutes lessons
Spain	Civics linked to history, geography and social sciences	Non-statutory Separate and integrated	3 hours per week
Sweden	Social sciences including history, geography and social studies	Non-core Integrated	885 hours over 9 years of compulsory schooling
Switzerland	Social studies	Non-statutory Integrated	Not specified
USA	Social studies including civics and government	Statutory core Separate and integrated	Time specified per week varies among states

TUJUAN PKN DALAM SISDIKNAS

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006, pp. 272, 280, 287).

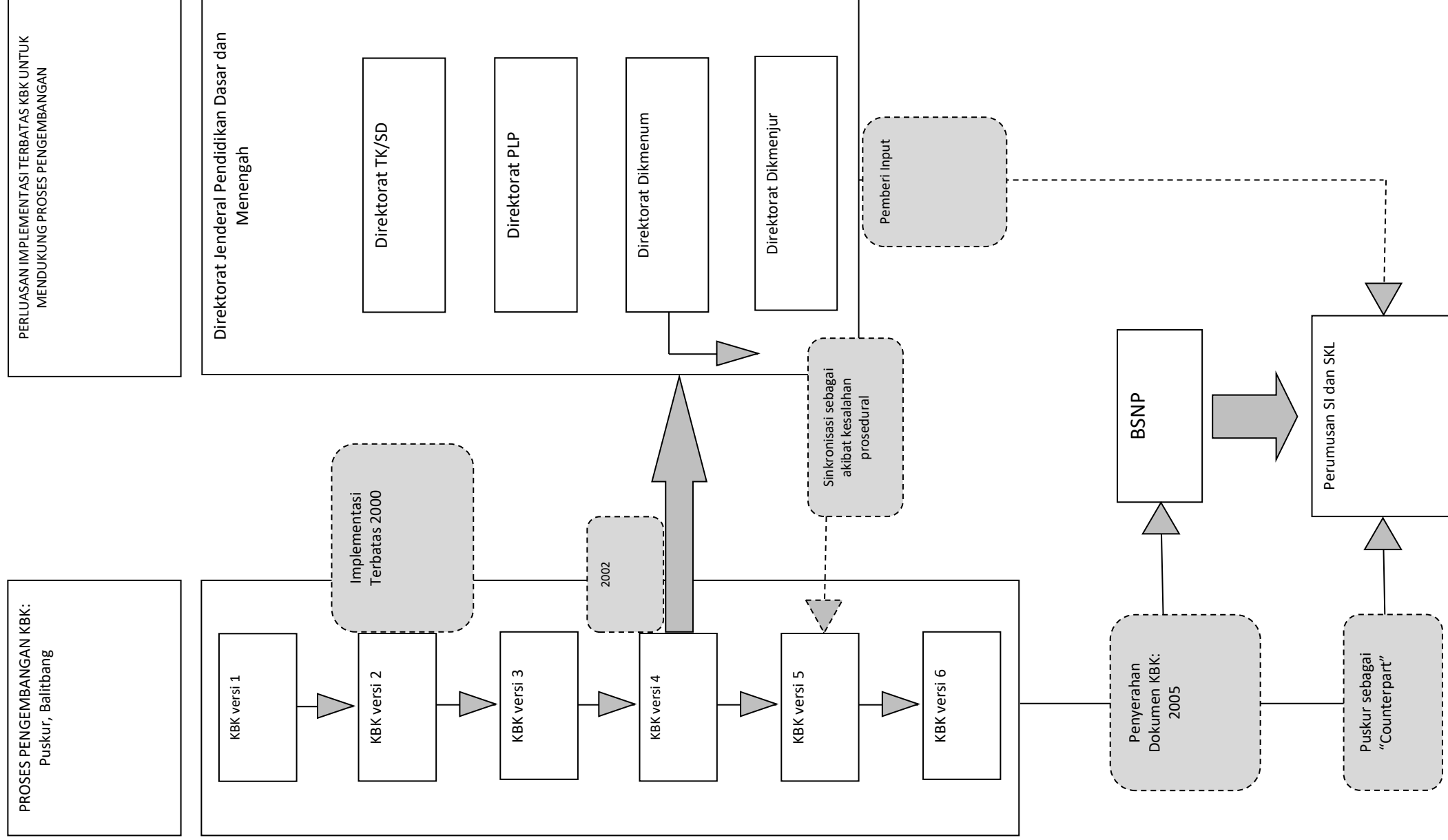
MAKRO KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (INDONESIA)



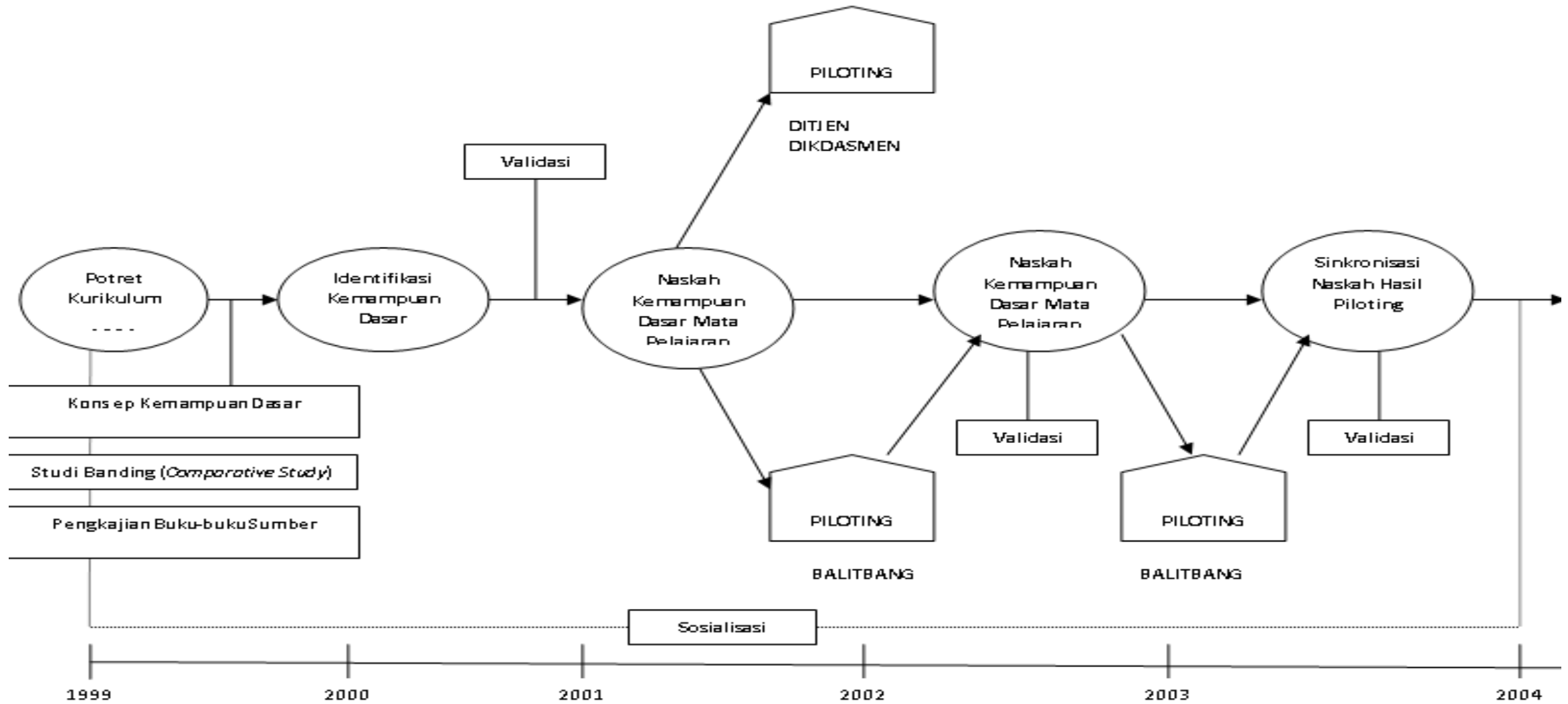
Bagan 2.1 Konstruksi Teoritis Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan

(Samsuri, 2010)

Proses Perumusan Standar Isi dan Kompetensi Lulusan (Indonesia)



Bagan 4.2. Proses Pembaharuan Kurikulum 2004 (KBK) Pengganti Kurikulum 1994



Sumber: Depdiknas (2003e: 21)
Sebagaimana dikutip Samsuri, 2010)

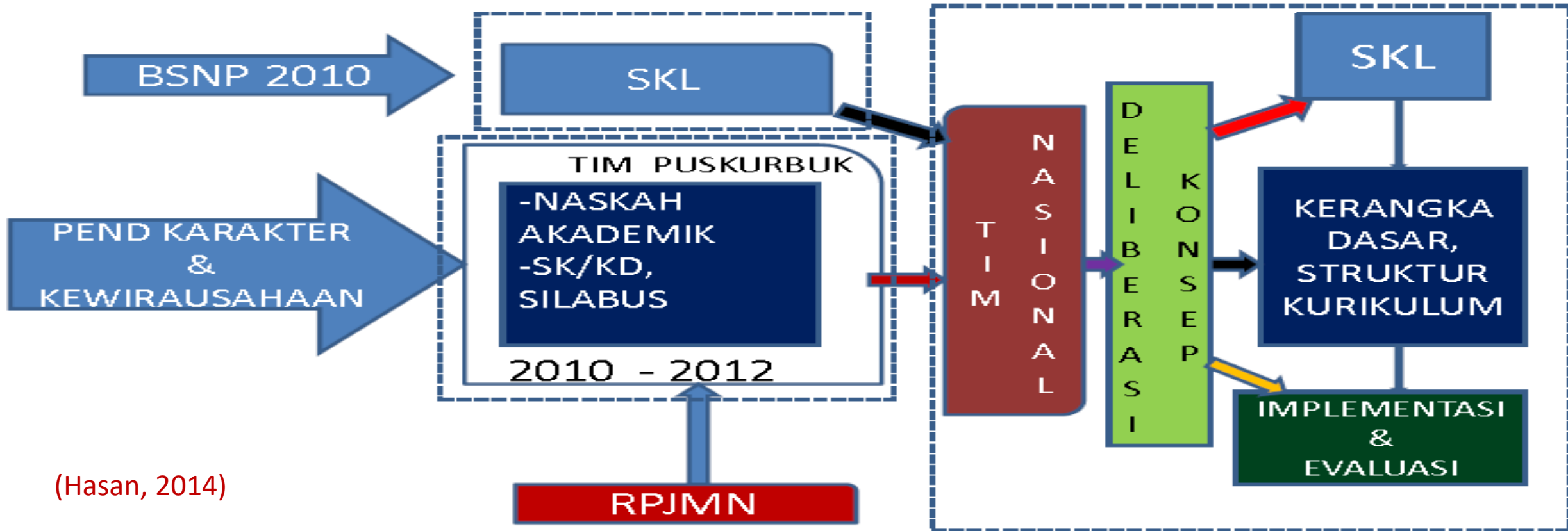
PEMBUAT KEBIJAKAN PKN DALAM SISDIKNAS (Kasus INDONESIA – k13)



(Hasan, 2014)

Pembuatan kebijakan pendidikan nasional (Kasus INDONESIA – K13)

PERKEMBANGAN KURIKULUM 2013



(Hasan, 2014)